

**POLA KADERISASI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) DALAM
PENGEMBANGAN KADER MUDA DI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Oleh:

**SHOFFI SILVA SALSABILLA
NPM 2116021042**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**POLA KADERISASI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) DALAM
PENGEMBANGAN KADER MUDA DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh
SHOFFI SILVA SALSABILLA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

POLA KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

SHOFFI SILVA SALSABILLA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung merupakan partai politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memiliki sistem kaderisasi tersendiri dalam pengembangan kader muda. Selama periode 2020–2024, jumlah kader muda mengalami peningkatan. Namun, data menunjukkan bahwa tidak semua kader muda yang telah direkrut tetap aktif dalam kegiatan kepartaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola kaderisasi PKS dalam pengembangan kader muda di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan teori pola pembinaan kader yang dikemukakan oleh Syamsudin Haris dkk., yang mencakup 1) Adanya tata norma, aturan dan tata institusi; 2) Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis, 3) Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader; 4) Membentuk jaringan kerja kader; 5) Perlu dilakukan *affirmative action*; 6) Model pembinaan kader perempuan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kaderisasi PKS dalam pengembangan kader muda di Provinsi Lampung berlangsung sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Pola kaderisasi dimulai dari PKS Menyapa, dilanjutkan dengan rekrutmen melalui pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA), serta pembinaan dalam Unit Pembinaan Anggota (UPA) berbasis Kurikulum Kaderisasi Partai (KKP) yang dievaluasi melalui Indikator Capaian (IC). Kader perempuan difasilitasi melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). PKS menyediakan wadah khusus bagi kader muda melalui Gerakan Muda (GEMA) Keadilan dan Garuda Keadilan (GK). Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Gema Keadilan mengalami kendala dalam transisi kader. Sementara itu, GK masih memiliki jaringan kader yang terbatas, serta citra organisasi yang cenderung eksklusif sebagai wadah bagi anak kader PKS, sehingga kurang terbuka bagi kalangan muda di luar lingkungan partai.

Kata Kunci: Pola Kaderisasi, PKS Lampung, Kader Muda.

ABSTRACT

CADERIZATION PATTERN OF THE PROSPEROUS JUSTICE PARTY (PKS) IN DEVELOPING YOUNG CADRES IN LAMPUNG PROVINCE

By
SHOFFI SILVA SALSABILLA

The Prosperous Justice Party (PKS) of Lampung Province is a political party based on Islamic values and has its own cadre system in developing young cadres. During the 2020–2024 period, the number of young cadres has increased. However, data shows that not all young cadres who have been recruited remain active in party activities. This study aims to determine the pattern of PKS cadre formation in developing young cadres in Lampung Province. This study uses the theory of cadre development patterns put forward by Syamsudin Haris et al., which includes 1) The existence of norms, rules and institutional arrangements; 2) The existence of an open and democratic recruitment model, 3) The existence of a cadre development evaluation system; 4) Forming a cadre network; 5) Affirmative action needs to be carried out; 6) Model for developing female cadres. The research method used is qualitative with a descriptive method. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the PKS cadre formation pattern in developing young cadres in Lampung Province is systematic, hierarchical, and sustainable. The cadre formation pattern starts from PKS Menyapa, followed by recruitment through the provision of Membership Cards (KTA), and coaching in the Member Development Unit (UPA) based on the Party Cadre Curriculum (KKP) which is evaluated through the Achievement Indicator (IC). Female cadres are facilitated through the Women and Family Resilience Sector (BPKK). PKS provides a special forum for young cadres through the Gerakan Muda (GEMA) Keadilan and Garuda Keadilan (GK). However, there are still obstacles in its implementation. Gema Keadilan experiences obstacles in the transition of cadres. Meanwhile, GK still has a limited cadre network, as well as an organizational image that tends to be exclusive as a forum for children of PKS cadres, so it is less open to young people outside the party environment.

Keywords: Cadre Formation Pattern, PKS Lampung, Young Cadres

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **POLA KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Shoffi Silva Salsabilla**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021042**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Darmawan Purba, S. IP., M. IP.
NIP. 19810601 201012 1 003

Bendi Juantara, S.I.P., M.A.
NIP. 19880923 201903 1 011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Tabah Maryanah

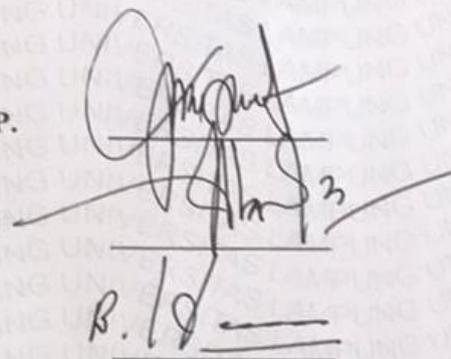
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

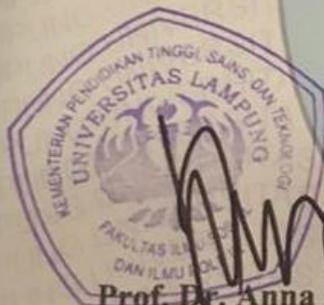
Ketua : **Darmawan Purba, S. IP., M. IP.**

Sekretaris : **Bendi Juantara, S.I.P., M.A.**

Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 1976082120 0003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **17 April 2025**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 April 2025
Yang Membuat Pernyataan



Shoffi Silva Salsabilla
NPM 2116021042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shoffi Silva Salsabilla, lahir di Lampung Barat pada tanggal 13 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Jhony Fernando dan Ibu Raddiana.

Jenjang pendidikan Penulis dimulai dari TK Negeri Sumber Jaya 2009, SD Negeri 3 Sumber Jaya tahun 2010, SMP Negeri 1 Sumber Jaya tahun 2016, SMA Negeri 1 Sumber Jaya tahun 2018, dan melanjutkan jenjang perkuliahan di Universitas Lampung tahun 2021 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non akademik dalam usaha menunjang kapasitas diri. Tahun 2023 penulis mendapatkan kesempatan sebagai Ketua Biro Komunikasi dan Informasi di HMJ Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 2024, penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 38 hari di Desa Lingai, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dan berkesempatan melakukan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) selama 6 bulan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Pulang sebagai sarjana adalah bentuk tanggung jawab kepada orang tua”

“one day you will thank yourself for holding on”

(Shoffi)

PERSEMBAHAN

م ب ر ال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamduillahirabbil'alamiin, telah engkau ridhoi Ya Allah langkah hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Teriring Shalawat serta Salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Mama tercinta

Jhony Fernando dan Raddiana

Skripsi ini adalah wujud rasa terima kasih atas segala yang telah kalian berikan, dan sebagai kewajiban yang harus ku selesaikan.

Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “POLA KADERISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM PENGEMBANGAN KADER MUDA DI PROVINSI LAMPUNG” Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

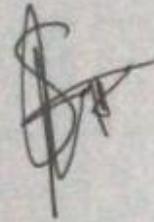
1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Darmawan Purba, S.IP, M.IP., dan Bapak Bendi Juantara, S.IP, M.A selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala bentuk bimbingan dan segala ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih selalu bersedia dihubungi dan ditemui ditengah kesibukan yang ada. Terima kasih atas segala ketelitian dan kesabaran yang diajarkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan banyak kebahagiaan oleh Allah SWT;

6. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP., selaku Dosen Penguji. Terima kasih telah memberikan banyak masukan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan terima kasih atas kesediaannya untuk selalu dihubungi ditengah kesibukan yang ada. Semoga segala nilai kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada Bapak dan Ibu semua. Terimakasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada posisi saat ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan diberkahi banyak kebaikan oleh Allah SWT;
8. Seluruh Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah membantu penulis dalam berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi selama masa perkuliahan ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT;
9. Seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar DPW PKS Lampung yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, baik semasa magang maupun semasa penulisan skripsi ini. PKS adalah keluarga baru bagi penulis, banyak sekali kebersamaan, kehangatan, ilmu dan pelajaran yang penulis dapat selama melakukan magang di PKS bahkan sampai skripsi ini diselesaikan. Semoga Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga besar PKS mendapat banyak keberhakan dan kebahagiaan dari Allah SWT;
10. Mamaku Tersayang, Raddiana. Terima kasih atas segala usaha dan dukungan yang telah mama berikan, mama adalah sumber kebahagiaan dalam hidupku, mama adalah pendengar setiap keluh kesah yang ada, tanpa dukungan dan segala doa dari mama skripsi ini tidak akan pernah ada, tanpa dukungan dan segala doa dari mama aku tidak akan pernah sampai pada titik ini. Mama, terima kasih selalu mengabdikan semua keinginanku selama ini. Semoga panjang umurmu di dunia ini, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepadamu untuk menyaksikan setiap langkah dan kesuksesan yang aku raih kelak, karna semua ini untuk mama;

11. Ayahku Tersayang, Jhony Fernando. Terima kasih atas kerjanya selama ini, ayah adalah motivasiku untuk menjadi orang yang hebat. Kegigihan dan kerjakerasmu akan menjadi panutanku dalam menjalani hidup. Semoga Allah memberikanmu kesehatan selalu untuk melihatku menjadi anak yang kau harapkan dan kau banggakan;
12. Kepada Adikku Tersayang, Salwa Fadilah, Lutfillah Zahirrah dan Muhammad Emran. Terima kasih telah menemani hari hariku selama ini, baik suka maupun duka. Terima kasih atas kepedulian serta perhatian kecil yang selalu diberikan kepadaku. Adik-adikku, kalian adalah motivasi terbesarku dalam mencapai semua titik di kehidupan ini, jadilah lebih baik. Banggakan mama dan ayah bersama-sama. Semoga Allah SWT selalu menjaga setiap langkah kalian;
13. Kepada keluarga besar Nek Cindan. Terima kasih atas dukungan baik materi maupun moril yang diberikan kepada penulis selama ini;
14. Kepada Uni Tika dan kak Wili. Terima kasih atas nasehat, dukungan dan bantuannya selama penulis tinggal di Bandar Lampung;
15. Untuk teman pertama penulis di kampus ini, Lita Evayanti Batubara. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik, banyak hal-hal berat yang kita lalui dalam hidup, seringkali kita merasa tidak adil karna keadaan, tapi percayalah walau setelah ini mungkin tidak akan banyak lagi moment yang kita lalui bersama, namun kebersamaan adalah hal yang tidak akan pernah hilang dari kita berdua. Jangan ragu untuk bercerita apapun, karna selamanya kamu adalah sahabatku;
16. Untuk sahabat penulis di kampus ini Jihan, Dinda, Anggun, Anida, Elia, Adel. Terima kasih selalu menjadi tempat bercerita segala hal selama perkuliahan ini, semuanya terasa menyenangkan saat kita semua bersama-sama. Kalian adalah pelengkap masa kuliah ini, selalu jaga persahabatan ini dan sukses dalam menjalankan semua hal untuk kalian di depan sana;
17. Untuk teman magang dan seperbimbingan penulis, Siti Nurhalizah. Terima kasih sudah berjuang bersama-sama dan berdiskusi banyak hal dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu mudahkan langkah kita selanjutnya;

18. Terakhir, terima kasih aku ucapkan kepada diriku sendiri "Shoffi Silva Salsabilla". Terima kasih sudah berhasil menyelesaikan tanggung jawab ini, terima kasih sudah melawan segala perasaan yang berkecamuk untuk tetap tegak berdiri menyelesaikan kewajibanmu di tengah banyaknya cobaan yang datang. Kamu adalah kekuatan untuk dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah berjuang untuk sampai di titik ini.

Bandar Lampung, 15 April 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Shoffi Silva Salsabilla

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Tinjauan Partai Politik	7
2.1.1 Definsi Partai Politik	7
2.1.2 Fungsi Partai Politik	8
2.1.3 Klasifikasi Partai Politik	9
2.2. Tinjauan Kaderisasi	12
2.2.1 Definsi Pola Kaderisasi	12
2.2.2 Prinsip Kaderisasi	15
2.2.3 Model Kaderisasi	16
2.2.4 Definsi Kader dan Pengkaderan	17
2.2.5 Jenjang Pengkaderan	18
2.3. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25

3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Penentuan Informan	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.8 Teknik Keabsahan Data	33
IV. GAMBARAN UMUM	35
4.1. Gambaran Umum	35
4.1.1 Struktur Kepengurusan DPW PKS Provinsi Lampung	35
4.1.2 Visi Misi PKS	40
4.1.3 Falsafah Dasar Perjuangan PKS	41
4.1.4 Arti Lambang Partai PKS	42
4.1.5 Sistem Kaderisasi	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Pola Kaderisasi PKS Provinsi Lampung	45
5.1.1 Tata Norma, Aturan, dan Tata Institusi dalam Sistem Pengkaderan	45
5.1.2 Model Rekrutmen yang Terbuka dan Demokratis	54
5.1.3 Sistem Evaluasi Pembinaan Kader yang Berkesinambungan	58
5.1.4 Jaringan Kerja Kader	61
5.1.5 <i>Affirmative Action</i> dalam Pembinaan Kader Perempuan	70
5.1.6 Model Pembinaan Kader Perempuan	73
5.2. Pembahasan	77
5.2.1 Tata Norma, Aturan, dan Tata Institusi dalam Sistem Pengkaderan	77
5.2.2 Model Rekrutmen yang Terbuka dan Demokratis	80
5.2.3 Sistem Evaluasi Pembinaan Kader yang Berkesinambungan	81
5.2.4 Jaringan Kerja Kader	81
5.2.5 <i>Affirmative Action</i> dalam Pembinaan Kader Perempuan	83
5.2.6 Model Pembinaan Kader Perempuan	84
5.2.7 Hubungan Kualitas Kader dengan Kuantitas Suara PKS Provinsi Lampung pada Pemilu	87

VI. PENUTUP	89
6.1. Simpulan	89
6.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Jenjang Pengkaderan Partai PKS	23
Tabel 3. 1 Informan Peneliti.....	29
Tabel 5. 1 Pola Kaderisasi PKS dalam Pengembangan Kader Muda di Provinsi Lampung	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Jumlah Kader Muda PKS Provinsi Lampung 2020-2024.....	2
Gambar 1. 2 Persentase Kader Muda Aktif PKS Lampung 2020-2024	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4. 1 Lambang PKS	42
Gambar 5. 1 PKS Menyapa.....	46
Gambar 5. 2 Pelantikan Anggota Pelopor, Madya dan Dewasa	49
Gambar 5. 3 Rapat F-PKS Lampung mengenai Komitmen Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat.....	52
Gambar 5. 4 KTA PKS	56
Gambar 5. 5 Pelantikan Gema Keadilan PKS Lampung	64
Gambar 5. 6 Kegiatan GK PKS Lampung	66
Gambar 5. 7 MNG GK PKS Lampung	68
Gambar 5. 8 RKI PKS Lampung Timur	74
Gambar 5. 9 BPKK PKS Lampung.....	76

DAFTAR SINGKATAN

1. AD/ART : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
2. BPKK : Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
3. DPD : Dewan Pengurus Daerah
4. DPP : Dewan Pengurus Pusat
5. DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
6. GEMA : Gerakan Muda
7. GK : Garuda Keadilan
8. IC : Indikator Capaian
9. KKP : Kurikulum Kaderisasi Partai
10. KPPI : Kaukus Perempuan Politik Indonesia
11. KTA : Kartu Tanda Anggota
12. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
13. ORMAS : Organisasi Masyarakat
14. PEMILU : Pemilihan Umum
15. PKS : Partai Keadilan Sejahtera
16. RKI : Rumah Keluarga Indonesia
17. SOP : Standar Operasional Prosedur
18. UPA : Unit Pembinaan Anggota

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

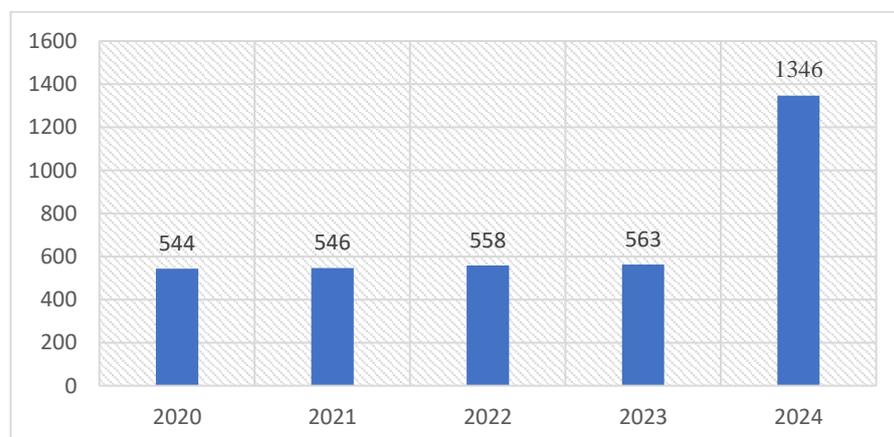
Partai politik memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi karena dalam demokrasi, rakyat memegang kekuasaan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya secara langsung melainkan dengan memilih perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peran (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi, partai politik memainkan peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara proses pemerintahan dan warga negara (Jimly Asshidiqie 2010).

Menurut Firmanzah (2008), terdapat dua peran utama partai politik; pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, kaderisasi, dan pementapan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik mengembangkan tugas yang bersifat lebih eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik juga terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Peran partai politik yang efektif menjadikan kader yang berkualitas, unggul, kuat, dan solid melalui proses rekrutmen dan kaderisasi politik. Kader partai ini akan maju sebagai wakil rakyat dalam proses pemilu.

Proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang akan melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan

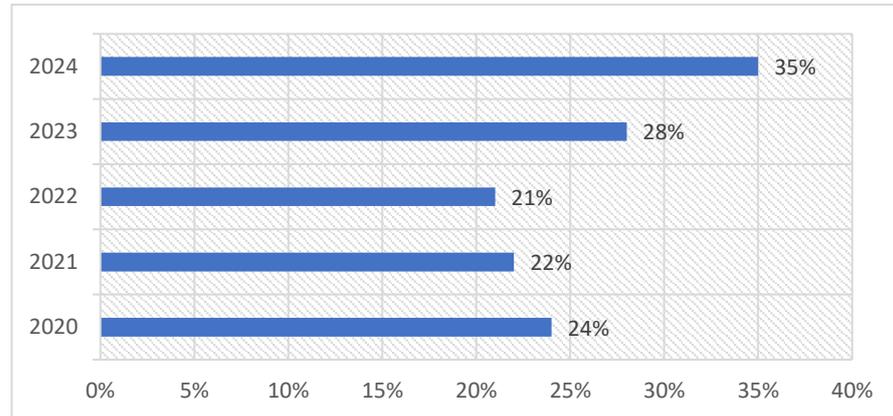
khususnya dalam pemerintahan (Ramlan Surbakti, 2010). Proses kaderisasi merupakan hal penting bagi partai politik, alasan ini didasari oleh pandangan Harahap (2017) yang mengungkapkan bahwa dari kaderisasi ini maka partai mempersiapkan atau mencetak calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi untuk menjadi pemimpin di masa depan yang siap dalam menjalankan organisasi. Rekrutmen dan kaderisasi politik adalah proses di mana seseorang mengalami proses politik, yaitu memilih, menjaring, dan melatih calon pemimpin yang siap untuk mewakili aspirasi dan janji masyarakat. dan menjadi pemimpin yang memperhatikan kepentingan rakyat dan partai.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki ideologi berbasis nilai nilai agama islami yang memiliki cara sendiri dalam proses kaderisasi. Kaderisasi yang diterapkan oleh PKS dengan sistem bertahap, dengan memberikan materi sesuai jenjang yang ada. Penjenjangan ini merupakan upaya untuk mencapai pemahaman kader di setiap jenjangnya. Penjenjangan yang ada di PKS sebagaimana tertuang dalam AD ART PKS 2023 pasal 10 ayat 5 yaitu, kelompok anggota pendukung, kelompok anggota penggerak dan kelompok anggota pelopor. PKS Provinsi Lampung pada periode 2020-2024 menunjukkan peningkatan jumlah kader muda. Adapun data jumlah kader muda selama periode tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Jumlah Kader Muda PKS Provinsi Lampung 2020-2024
Sumber: DPW PKS Provinsi Lampung, 2025

Meskipun jumlah kader muda PKS Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Namun, data menunjukkan bahwa tidak semua kader muda yang telah direkrut tetap aktif dalam kegiatan kepartaian. Adapun data persentase keaktifan kader muda PKS Provinsi Lampung selama 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Persentase Keaktifan Kader Muda PKS Lampung 2020-2024

Sumber: DPW PKS Provinsi Lampung, 2025

Kondisi ini menunjukkan, meskipun PKS Provinsi Lampung berhasil meningkatkan jumlah kader muda selama 2020-2024 Namun, persentase tingkat keaktifan kader muda mengalami turun naik atau *volatility*. Hal ini menjadi perhatian serius dalam proses kaderisasi. Oleh karena itu, kaderisasi mesti berfokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan kader dalam berbagai aktivitas kepartaian.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang “Pola Kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pengembangan Kader Muda di Provinsi Lampung”. Selain itu, peneliti juga melakukan penelurusan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Tujuannya adalah sebagai bahan perbandingan, referensi, dan acuan untuk mengadopsi ide, teori dan membangun kerangka pikir yang akan membantu penelitian.studi sebelumnya mencakup :

Penelitian pertama dilakukan oleh Moch. Ridho Hartoni (2021) yang berjudul Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung (Studi Pada Partai Perindo dan Partai Berkarya). Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif karena cukup memberi kemudahan bagi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah, prinsip kaderisasi yang dilakukan oleh Perindo dan Partai Berkarya dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip penting yaitu, terbuka, non-diskriminatif, dan berjenjang. Baik Perindo maupun Partai Berkarya telah berupaya menciptakan pola pembinaan kader di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup: tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik umum dan khusus; adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis; terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan; membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader; melakukan affirmative action dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik.

Penelitian kedua dilakukan Agus Toni (2013) tentang model kaderisasi yang berjudul Model Kaderisasi Partai Politik Pada DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung. Penelitian dilakukan di DPW PKS Provinsi Lampung dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana model kaderisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan Teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan PKS terdiri dari dua model kaderisasi. Pertama, model kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap. Tahapan kaderisasi meliputi Anggota Pemula, Muda, Madya, Dewasa, Ahli dan Purna. Masing-masing anggota dibina dalam Unit Pembinaan. Kedua, model kaderisasi keahlian yang dimiliki kader partai. Keahlian yang dimiliki tiap masing-masing pada struktur organisasi DPW PKS. Masing-masing keahlian tersebut dimiliki pada kader untuk meningkatkan integritas dan kapasitas kaderisasi DPW PKS provinsi Lampung.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yahya Ulumuddin (2023) tentang Pola Kaderisasi Anggota Partai Politik (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DiKabupaten Sumbawa). Penelitian ini menggunakan teori regenerasi Veitzhal Rivai yang terdiri dari dua jenis regenerasi, yaitu regenerasi formal dan informal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap subjek yang diteliti agar dapat menjawab permasalahan dan memperoleh informasi yang kemudian dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan penelitian pada situasi dan keadaan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan upaya partai dalam mendorong kadernya untuk turun dan aktif dalam masyarakat telah berhasil baik dalam proses pendidikan kadernya secara formal maupun diluar pendidikan kader melalui serangkaian kegiatan dan program yang digunakan oleh PDIP Sumbawa. Dengan demikian, fokus yang dibangun oleh partai adalah edukasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh yang telah dipilih masyarakat untuk hadir ditengah masyarakat, dengan demikian masyarakat akan merasa bahwa partai ada untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Dan banyaknya tokoh politik berasal dari PDI Perjuangan menjadi salah satu keberhasilan indikator kaderisasi Informal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

Hasil penelurusan penelitian terdahulu tersebut memiliki beberapa perbedaan yang paling utama adalah pada fokus pembahasan pada pola kaderisasi dalam pengembangan kader muda. Beberapa penemuan penelitian terdahulu di atas dilakukan dengan fokus penelitian yang berbeda, tentunya akan terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan pada hasil penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan kader muda di Provinsi Lampung?”.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui bagaimana pola kaderisasi yang dilakukan oleh PKS untuk mengembangkan kader muda di Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari dua aspek yakni manfaat akademis dan manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan konsep dan teori ilmu politik khususnya pola kaderisasi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta evaluasi bagi PKS untuk melengkapi dan memperbaiki pola kaderisasi dalam mengembangkan kader muda

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Partai Politik

2.1.1 Definsi Partai Politik

Partai politik adalah salah satu sarana yang menghubungkan antara pemerintah dengan rakyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang teroganisir, yang anggota anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Budiardjo (2008) tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Politik digunakan sebagai bentuk kekuasaan dalam proses pembangunan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Dalam konteks politik, kekuasaan berarti kekuatan sosial, yaitu. produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya sosial (Ansari, 2018).

Menurut Edmund Burke (2005) partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempermosikan kepentingan nasional secara bersama-sama. Politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas (Lapalombara dan Anderson 1992).

Berdasarkan berbagai teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang memiliki tujuan tertentu dan berusaha memperoleh kekuasaan untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum.

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Pada negara demokratis salah satu nya Indonesia partai politik memiliki beberapa fungsi. Menurut Budiardjo (2008) dalam menyelenggarakan demokrasi partai politik menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi partai politik sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Dapat dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagaim “pengeras suara”.
2. Sarana sosial politik diartikan sebagai proses memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya terjadi dalam masyarakat seseorang, disebut sosialisasi politik. Sosialisasi politik juga merupakan cara masyarakat menyebarkan "budaya politik", yaitu standar dan prinsip, dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sosialisasi politik memainkan peran penting dalam pembentukan budaya politik suatu negara.
3. Sebagai sarana rekrutmen politik berkait erat dengan masalah pemilihan pemimpin, baik di internal partai maupun di tingkat nasional. Setiap partai membutuhkan kader yang berkualitas untuk kepentingan internalnya karena hanya dengan kader ini partai dapat menjadi partai yang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Dengan kader yang baik, partai akan mudah menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*) partai politik berfungsi sebagai penghubung organisasional dan psikologis antara rakyat dan pemerintah mereka. Selain itu, partai berfungsi untuk menyatukan dan menyampaikan berbagai tuntutan yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, partai mempekerjakan kandidat untuk pemilihan wakil rakyat dan eksekutif. Dalam negara demokrasi, pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa baik partai politik berfungsi atau tidak.

Partai politik memperjuangkan kepentingan dalam skala besar melalui mekanisme electoral. Menurut Rahaman (2007) Ketika sebuah partai didirikan, tujuan berikut diharapkan: Pertama, menjadi alat untuk mengembangkan kesadaran warga negara akan partisipasi politiknya, dan kedua, menjadi alat untuk memperkuat kepentingan masyarakat. Sebagai sarana ketiga untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Keempat, menjadi wadah bagi munitas atau kelompok yang memiliki kesamaan ideologi dan kepentingan.

2.1.3 Klasifikasi Partai Politik

Maurice Duverger dalam Budiarjo (2008), Duverger dalam bukunya *Political Parties*. mengadakan klasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, sebagai berikut:

1. Sistem Partai-Tunggal

Istilah sistem partai-tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri (*contradictio in terminis*) sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*pars*). Namun demikian, istilah ini telah tersebar luas di kalangan masyarakat dan digunakan baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai mendominasi di antara beberapa partai lain.

2. Sistem Dwi-Partai

Sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan demikian mempunyai kedudukan dominan. Dewasa ini hanya beberapa negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi-partai, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru.

Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan oposisi (karena kalah). Oleh karena itu, tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum jelas di mana. Dalam sistem ini, partai yang kalah bertindak sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal oposisi*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum kedua partai berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang ada di tengah dua partai dan yang sering disebut pemilih terapung (*floating vote*) atau pemilih di tengah (*median vote*).

Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi-partai lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Sistem dwi-partai umumnya menggunakan sistem pemilihan *single member constituency* (Sistem Distrik) di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem pemilihan ini cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkuat sistem dwi-partai.

Indonesia pada tahun 1968 ada usaha untuk mengganti sistem multi-partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi-partai, agar sistem ini dapat membatasi pengaruh partai-partai yang telah lama mendominasi kehidupan politik. Beberapa eksese dirasakan

menghalangi badan eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi eksperimen dwi-partai ini, sesudah diperkenalkan di beberapa wilayah, ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentikan pada tahun 1969.

3. Sistem Multi-Partai

Keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. Perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada pola dwi-partai. Sistem multipartai ditemukan antara lain di Indonesia, Malaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi Rusia.

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.

Partai-partai oposisi pun kurang memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut kepentingan situasi yang dihadapi partai masing-masing. Lagi pula, sering kali partai-partai oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi pemerintah. Dalam sistem semacam ini masalah letak tanggung jawab menjadi kurang jelas. Dalam situasi di mana terdapat satu partai yang dominan, stabilitas politik dapat lebih dijamin.

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (*Proportional Representation*) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru. Melalui sistem Perwakilan Berimbang partai-partai kecil dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi.

2.2. Tinjauan Kaderisasi

2.2.1 Definsi Pola Kaderisasi

Pola dapat di katakan sebagai model untuk menunjukan suatu proses yang di dalamnya mengandung hubungan dan unsur pendukungnya. Kurniasri (2015) menyatakan pola adalah bentuk model, sistem ataupun cara kerja. Kaderisasi menurut (Adjiwicaksana dalam Nurtanto dan Munandar, 2021) adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman dan nilai yang diturunkan kepada anggota. Kaderisasi adalah suatu proses degradasi atau penurunan dan transfer nilai nilai, baik nilai

umum maupun nilai khusus yang dilakukan oleh institusi yang bersangkutan. Pemberian nilai-nilai tersebut mengandung materi-materi kepemimpinan, manajemen, dasar dan azas organisasi atau institusi terkait dan lain sebagainya (Rahmawati, 2016).

Kaderisasi pada partai politik lebih bersifat sebagai proses intervensi dari partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan fungsi partai (Syamsudin 2016). Proses kaderisasi sering mengandung materi-materi kepemimpinan, manajemen, dan sebagainya, karena yang masuk dalam institusi tersebut nantinya akan menjadi penerus tingkat-tingkat estafet kepemimpinan, terlebih lagi pada institusi dan organisasi yang dinamis. Kaderisasi berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai (Adrianus dalam Harahap 2017:). Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ditentukan oleh kecenderungan tipe dari partai yang bersangkutan. Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan inti dari kelanjutan perjuangan partai ke depan dan juga inti dari keberadaan partai politik.

Dapat disimpulkan bahwa kaderisasi merupakan proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis oleh suatu organisasi atau institusi untuk menanamkan serta mentransfer nilai-nilai dasar, kepemimpinan, dan manajemen kepada para anggotanya. Dalam konteks partai politik, kaderisasi berfungsi sebagai upaya intervensi untuk meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjalankan fungsi partai secara efektif. Proses ini juga memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kompetensi dan loyalitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, kaderisasi menjadi faktor penting dalam keberlanjutan dan eksistensi partai politik.

Dengan demikian, pola kaderisasi adalah sistem yang digunakan untuk membina dan mentransfer nilai-nilai organisasi secara sistematis, kaderisasi bertujuan meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjalankan fungsi partai.

Syamsudin Haris., dkk (2016) pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus;
2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis;
3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan;
4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi;
5. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan- jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapo politik, parlemen dan jabatan publik lainnya;
6. Model pembinaan kader perempuan,, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah partai politik, karena ini merupakan dasar dari perjuangan partai ke depan dan menjadi dasar dari keberadaan partai tersebut. Tanpa kaderisasi partai politik sulit bergerak dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi menjadi syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi sangat penting mengingat perlu ada transfer pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam suatu kajian tertentu serta kaderisasi digunakan untuk mempersiapkan calon-calon yang siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.

2.2.2 Prinsip Kaderisasi

Kaderisasi partai politik dapat dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses tersebut berlaku prinsip-prinsip. Syamsudin Haris., dkk (2016) membagi prinsip prinsip kaderisasi, sebagai berikut:

1. Terbuka pada partai politik harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi terbuka disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota partai politik maupun anggota sayap partai memiliki potensi dengan penilaian yang telah ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi. Dalam kaitan ini, kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan. Dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah proses kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

2. Non-Diskriminatif, pemberian akses yang sama dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mengikuti atau mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Prinsip non-diskriminatif dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarkhi parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.
3. Berjenjang, penjenjangan kaderisasi parpol didasarkan pelapisan yang bertahap, bertingkat atau piramidal. Indikator penjenjangan kaderisasi dilakukan melalui: a) Tingkat Dasar; b) Tingkat Menengah dan; c) Tingkat lanjut atau penyebutan lainnya. Rasionalisasi penjenjangan model hirarkhi ini bisa dilakukan karena alasan penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (materi bersifat piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan karir dalam organisasi (karir bersifat piramidal).

2.2.3 Model Kaderisasi

Syamsudin Haris., dkk (2016) membagi prinsip prinsip kaderisasi, sebagai berikut:

1. Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik

Kaderisasi untuk Anggota Partai Politik Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai moderen, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara tetap dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan training tertentu oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota parpol di partai yang pelebagaan politiknya bagus

dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi parpol yang bersangkutan.

2. Kaderisasi untuk Non Anggota Partai Politik

Organisasi sayap partai juga merupakan bagian penting dari proses kaderisasi partai politik. Dibandingkan dengan sumber kaderisasi dari organisasi masyarakat lainnya, ideologi partai politik dan semangat militansi dapat lebih mudah disebarkan melalui sayap partai internasionalisasi. Karena organisasi sayap merupakan bagian penting dari partai politik. Organisasi sayap partai sangat membantu partai politik dalam melaksanakan, bersosialisasi, dan menyebarkan program dan kebijakannya. Organisasi sayap partai dapat berupa organisasi pemuda, mahasiswa, perempuan, profesi, atau keagamaan.

Kaderisasi pada organisasi sayap partai biasa menjadi perluasan basis dari parpol yang bersangkutan. dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.

2.2.4 Definisi Kader dan Pengkaderan

Kader adalah sumber daya manusia yang melakukan proses pengelolaan dalam suatu organisasi. Partanto (dalam Harahap, 2017) mengartikan kader sebagai orang yang di didik untuk menjadi pelanjut tongkat estapet suatu partai atau organisasi tunas muda. Menurut Veithzal dan Mulyadi (dalam Syahputra dan Darmansah, 2020) kader diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang jabatan atau pekerjaan penting di pemerintahan, partai, dan lain-lain. Oleh karna itu, kader adalah seseorang yang telah dipersiapkan oleh pimpinan institusi/kelompok/organisasi untuk

menjadi pengganti dalam estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang, agar institusi/kelompok/organisasi dapat berkembang kearah yang lebih baik.

Syarifuddin (2002) mengartikan pengkaderan ialah proses, cara, kegiatan mendidik atau membentuk kader, dalam pengkaderan merupakan posisi yang menjadikan kader sebagai obyek dan pasif yakni sebagai orang yang di didik atau di bentuk menjadi kader. Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter kader-kader agar sepaham dengan ideologi ataupun agar kader-kader tersebut mengerti aturan-aturan yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi sehingga tercipta kader-kader yang terampil dan berwawasan luas serta mampu mencapai tujuan organisasi atau lembaga. Pengekaderan merupakan usaha yang sering dilakukan oleh suatu organisasi dalam membangun para kadernya. Usaha tersebut di antaranya berisikan penanaman nilai-nilai idiologi yang dipegang oleh suatu organisasi maupun keterampilan dalam memimpin. Jadi dapat diartikan bahwa pengkaderan ialah proses, cara, perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader melalui usaha yang dibangun oleh suatu organisasi/partai.

2.2.5 Jenjang Pengkaderan

Jenjang pengkaderan digunakan untuk membagi materi dan ketrampilan yang akan dimiliki oleh peserta kaderisasi serta hasil luaran yang akan dihasilkan pada masing-masing jenjang. Hasil luaran ini termasuk peran yang akan diambil oleh peserta kaderisasi baik dalam partai maupun di luar partai, serta mandat yang akan diberikan parpol pada peserta kaderisasi berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan partai untuk melaksanakan fungsinya. Syamsudin Haris., dkk (2016) membagi jenjang kaderisasi dalam tiga, yakni:

1. Kaderisasi Tingkat Pertama

Kaderisasi tingkat pertama biasanya lebih menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi parpol. Kaderisasi pada tingkat pertama biasa bertujuan untuk menciptakan budaya partai politik dan memperkuat peserta kaderisasi. Pada tingkat ini, selain internalisasi prinsip-prinsip partai politik, proses kaderisasi juga digunakan untuk memberikan anggota partai keahlian manajemen dan dasar-dasar manajemen partai. Manajemen partai mencakup hal-hal teknis seperti rapat, perencanaan dan pelaksanaan program, kampanye, penggalangan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan manajemen partai.

Pada tingkat pertama kaderisasi, diberikan pelatihan tentang kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media, dan *public speaking* yang bersifat sederhana. Untuk tingkat pertama, kaderisasi ditujukan untuk anggota parpol atau sayap partai yang akan diproyeksikan menjadi pengurus partai di tingkat kabupaten/kota atau anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, serta kepala daerah tingkat kabupaten/kota.

Untuk kader yang diproyeksikan menjadi pengurus partai atau anggota badan perwakilan di tingkat kabupaten/kota, perlu diberikan pembekalan tambahan mengenai menerapkan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, serta bagaimana melaksanakannya. Dengan demikian kaderisasi tingkat pertama ini diharapkan memahami dan menguasai materi-materi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dasar-dasar ideologi partai politik;
- 2) Sejarah partai politik;
- 3) Aturan-aturan internal (AD/ART) partai politik;
- 4) Tata kelola partai politik di tingkat kabupaten/kota;

- 5) Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat kabupaten/kota;
- 6) Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota;
- 7) Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota;
- 8) Masalah kepemimpinan dan tingkat lokal;
- 9) Masalah kepemiluan di tingkat lokal (kabupaten/kota) beserta strategi pemenangannya;
- 10) Hubungan dengan media massa;
- 11) Dll

2. Kaderisasi Tingkat Madya

Kaderisasi tingkat madya dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat provinsi atau anggota DPRD tingkat provinsi serta Kepala Daerah tingkat provinsi, anggota DPRD dan kepala daerah tingkat provinsi. Pada jenjang kaderisasi ini, para kader biasanya diberi keahlian yang lebih relevan dengan kemenangan pemilu, seperti kemampuan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal dengan mobilisasi massa, keterwakilan politik, dan *problem solving skill*, pembuatan kebijakan, termasuk strategi-strategi kampanye.

Pada kaderisasi jenjang madya, durasi dan kurikulum modul biasanya lebih rinci, dan prosentasi peningkatan kemampuan dan keterampilan manajerial terkait pemenangan pemilu jauh lebih besar ketimbang internalisasi. Ini terjadi baik di lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan daerah, budaya partai dan konsolidasi partai. Dalam kaitan peningkatan ketrampilan manajerial, kaderisasi tingkat madya biasanya diperuntukkan untuk meningkatkan ketrampilan tentang kontribusi parpol dalam pemenangan pemilu, selain urusan tata kelola parpol untuk

tingkat propinsi. Setelah dilakukan kaderisasi tingkat madya ini para kader diharapkan mampu menguasai:

- 1) Tata kelola partai politik di tingkat propinsi;
- 2) Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat propinsi;
- 3) *Problem solving skill* terkait dengan kebijakan di tingkat propinsi;
- 4) Proses pembuatan kebijakan di tingkat propinsi;
- 5) Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat propinsi;
- 6) Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di tingkat propinsi;
- 7) Masalah kepemimpinan;
- 8) Masalah kepemiluan di tingkat propinsi beserta strategi pemenangannya;
- 9) Hubungan dengan media massa;
- 10) Ketrampilan *lobbying*

3. Kaderisasi Tingkat Utama

kaderisasi tingkat utama diperuntukan bagi calon pengurus parpol, anggota legislatif tingkat pusat, serta calon presiden dan wakil presiden. Pada kaderisasi tingkat utama ini selain masalah internalisasi nilai-nilai partai dan pemahaman tentang masalah kepemiluan, termasuk regulasi dan strategi pemenangan pemilu, kaderisasi tingkat utama ini juga memberikan pengetahuan manajerial tentang masalah nasional dan internasional, pemahanan kebijakan partai di tingkat nasional, lingkungan strategis internasional, dan pemahaman sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, dan hukum. Peningkatan kemampuan kader dalam komunikasi politik, *lobbying*, dan kepemimpinan juga dibarengi dengan pemahaman tentang hal-hal tersebut.

Jenjang kaderisasi tingkat utama ini mencakup keterampilan kepemimpinan dan komunikasi politik, seperti keterampilan komunikasi publik, masalah representasi, dan *problem-solving-skill* untuk persoalan-persoalan ditingkat nasional, kemampuan untuk membuat kebijakan di DPR dan pemerintahan, kemampuan manajemen waktu, dan peningkatan pengetahuan tentang teknologi informasi, terutama yang berkaitan dengan masalah pemilihan dan pembuatan kebijakan, yang juga terkait dengan masalah hubungan media. Melalui kaderisasi tingkat utama ini diharapkan peserta kader memiliki kemahaman dan ketrampilan tentang.

- 1) Tata kelola partai politik di tingkat nasional;
- 2) Dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat nasional;
- 3) *Problem solving skill* terkait dengan kebijakan di nasional;
- 4) Proses pembuatan kebijakan di nasional;
- 5) Hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat nasional dan global;
- 6) Keuangan partai politik dan keuangan pemerintah daerah di nasional dan global;
- 7) Masalah kepemimpinan dan kemampuan komunikasi interpersonal;
- 8) Masalah pemilihan di tingkat nasional beserta strategi pemenangnya;
- 9) Hubungan dengan media massa;
- 10) Ketrampilan negosiasi dan *lobbying*;
- 11) Pemahaman lingkungan strategis internasional;
- 12) Pemahaman mengenai sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, serta hubungan internasional;
- 13) Dll.

Jenjang pengkaderan Paratai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung dilakukan dengan tiga pengelompokan yang mencakup:

Tabel 2. 1 Jenjang Pengkaderan Partai PKS

No	Jenjang Kader	Uraian
1	Anggota Pendukung	Pemula dan Siaga
2	Anggota Penggerak	Muda dan Pratama
3	Anggota Pelopor	Madya, Dewasa dan Utama

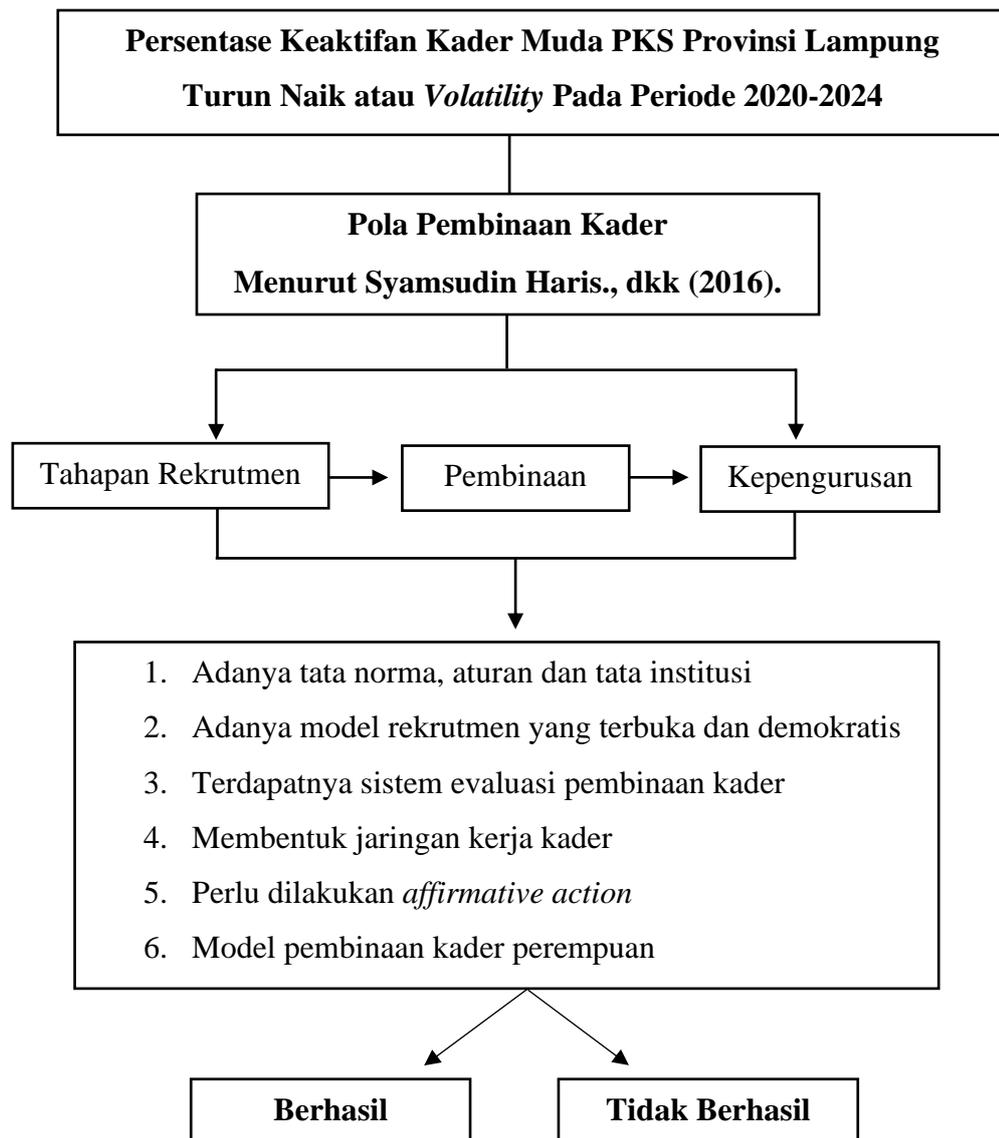
Sumber: Data AD ART PKS Provinsi Lampung, 2023

Anggota pendukung yakni pemula dan siaga diartikan sebagai anggota resmi sebab telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan anggota yang terlibat aktif dalam kegiatan partai. Anggota penggerak yakni muda yang diartikan sebagai anggota yang mengikuti pembinaan partai dan pratama adalah anggota yang siap berkontribusi kepada bangsa dan negara bersama partai. Anggota pelopor yakni madya yang diartikan sebagai anggota yang terkait dengan segala peraturan partai, dan dewasa adalah anggota yang dinamisator dalam kerja kerja partai sedangkan utama adalah anggota yang menjadi teladan partai.

Penggunaan jenjang pengkaderan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama, pengkaderan diandaikan dalam skema piramidal. Pentahapan materi dalam skema piramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (standarisasi). Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi pada posisi-posisi yang ada ditingkat lokal dengan regional atau pusat.

2.3. Kerangka Pikir

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung pada periode 2020-2024 persentase keaktifan kader muda mengalami turun naik atau *volatility*. Sehingga hal ini yang mendasari peneliti dalam membuat kerangka berfikir, yakni untuk mengetahui pola kaderisasi apa yang di gunakan oleh PKS Provinsi Lampung dalam mengembangkan kader muda berdasarkan teori dari Syamsudin Haris., dkk (2016).



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui bahasa tertulis dan lisan maupun gambar, serta bukan berbentuk angka. (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan (Moleong, 2013).

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mengungkap dan memahami informasi faktual terkait suatu peristiwa tertentu, sehingga memungkinkan adanya pemahaman terhadap fenomena tersebut melalui analisis naratif. Teknik penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji pola kaderisasi PKS dalam pengembangan kader muda di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian secara menyeluruh dan teliti terhadap pola kaderisasi PKS dalam pengembangan kader muda di Provinsi Lampung dengan mengumpulkan informasi dari sumber informan yang kredibel.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan mempertahankan arah penelitian yang terfokus dan terstruktur secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membatasi diskusi yang terlalu luas dan menyimpang dari fokus utama penelitian, sehingga membantu dalam mengidentifikasi informan untuk dapat memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan dan valid (Sugiyono, 2019).

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji pola kaderisasi yang di jalankan oleh PKS dalam pengembangan kader muda di Provinsi Lampung menggunakan teori dari Syamsudin Haris., dkk (2016) yakni tentang pola pembinaan kader. Pola pembinaan kader yang terprogram, terukur, sistematis, dan komprehensif serta berlaku di semua lini kader dan wilayah kader yang mencakup:

1. Adanya tata norma, aturan dan tata institusi dalam membentuk sistem pengkaderan, baik pengkaderan umum dan pengkaderan khusus. Berikut dua indikator yang bisa dijadikan acuan:
 - a) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), keberadaan SOP harus tertulis jelas dalam mengatur proses kaderisasi, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga pengembangan kader.
 - b) Pengaturan aturan dan etika dalam proses pengkaderan yang digunakan untuk mengatur perilaku dan norma kader, serta aturan disiplin yang berlaku selama proses pengkaderan.

2. Adanya model rekrutmen yang terbuka dan demokratis, Terdapat beberapa aspek indikator, sebagai berikut:
 - a) Transparansi dalam proses rekrutmen. Semua informasi yang berkaitan dengan standar seleksi, proses seleksi, dan hasil seleksi diumumkan secara terbuka kepada publik.
 - b) Prosedur seleksi yang jelas dan terbuka menggunakan mekanisme yang objektif dan adil, misalnya melalui ujian tertulis, wawancara, atau uji kompetensi, dan tidak bergantung pada koneksi pribadi atau nepotisme.

3. Terdapatnya sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan, Terdapat beberapa indikator, sebagai berikut:
 - a) Adanya rencana dan program pembinaan yang jelas. Kader harus memahami tujuan pelatihan dan tahapan yang harus mereka lalui. Program pelatihan harus memiliki tujuan yang terukur dan realistis.
 - b) Pemantauan indikator jangka panjang. Pembinaan kader dievaluasi tidak hanya selama program, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengetahui apakah hasil pelatihan membawa perubahan signifikan pada organisasi atau komunitas.

4. Membentuk jaringan kerja kader melalui interaksi antar kader demi meningkatkan kualitas kader agar lahir kader-kader yang loyal dan berdedikasi tinggi. Terdapat beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan:
 - a) Interaksi antar kader. Melihat seberapa sering kader berinteraksi satu sama lain, baik melalui pertemuan formal maupun informal. Interaksi dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam memperkuat jaringan kerja kader.
 - b) Tingkat keterlibatan dalam aktivitas Bersama kader yang terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, seperti pelatihan, seminar, dan proyek bersama.

5. Perlu dilakukan *affirmative action* dalam merekrut dan melakukan pola pembinaan perempuan kader partai guna mencapai meningkatkan jumlah perempuan dalam partai politik, parlemen, maupun jabatan-jabatan publik. Selain itu kaderisasi pada kelompok perempuan juga berarti meningkatkan kemampuan dan ketrampilan perempuan terkait dengan peran yang dimainkan dalam partapi politik, parlemen dan jabatan publik lainnya. Terdapat indikator penting yang telah diterapkan, yaitu:

- a) Kebijakan kuota gender, adanya kebijakan kuota khusus untuk perempuan dalam daftar calon anggota parlemen, jabatan publik, atau dalam struktur partai. Minimal 30% dari posisi strategis di partai atau parlemen diisi oleh perempuan.
6. Model pembinaan kader perempuan,, baik dari segi strategi pembinaan, materi pembinaan maupun metode pembinaan hendaknya dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat diterapkan dalam model pembinaan kader perempuan:
- a) Pembinaan kader perempuan melalui strategi pada fokus peningkatan kapasitas kepemimpinan, keterampilan dan kemandirian.
 - b) Partisipatif dan dialogis, menggunakan metode diskusi kelompok atau studi kasus untuk mendorong keterlibatan aktif kader perempuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh fenomena dan peristiwa yang sedang diteliti demi mendapatkan data-data yang akurat (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Lampung yang beralamat di jalan Untung Suropati No.3, Kp. Baru, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung.

3.4 Penentuan Informan

Keterlibatan informan dalam melakukan penelitian sangat penting untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Informasi tersebut kemudian selanjutnya dikaji untuk menghasilkan temuan yang valid, oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan individu yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang informasi tertentu yang kita cari untuk menjamin perolehan data yang dapat diandalkan dan tepat untuk pelaksanaan upaya penelitian yang efektif (Moleong, 2017).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun menurut Sugiyono (2012) teknik penentuan informan istilah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan Peneliti

No	Jabatan	Nama
1	Ketua DPW PKS Provinsi Lampung	H. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A.
2	Ketua Bidang Kaderisasi PKS Provinsi Lampung	Drs. H. Joko Mulyono, M.AP.
3	Sekretaris Bidang Kaderisasi PKS Provinsi Lampung	Trisakti Wijayana, S.Pd., M.Pd.
4	Kader Muda PKS Provinsi Lampung	Rifqi Ziyadurrohman, S.Kom.
5	Kader Muda PKS Provinsi Lampung	Athifah Mukminah, S.Hum.
6	Ketua Gema Keadilan PKS Lampung	Ahmad Khairuddin Syam, S.Kom., M.SI.
7	Pengurus GK PKS Lampung	M. Fajar Ghosiyah Zain, S.Pd
8	Akademisi FISIP Unila	Tiyas Apriza, S.I.P., M.I.P.

Sumber: Data di olah peneliti, 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memperoleh sumber data utama terdiri dari wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, Ketua Bidang Kaderisasi, Sekretaris Bidang Kaderisasi, Kader Muda PKS dan Ketua Gema Keadilan PKS Lampung, Pengurus GK PKS Lampung, Akademisi FISIP Unila.

Sugiyono (2019) mengungkapkan sumber primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder dicirikan sebagai sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, namun bergantung pada perantara seperti individu atau publikasi.

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti untuk tujuan yang jelas dalam melakukan suatu penelitian tertentu. Data primer data diperoleh dari sumber primer atau melalui keterlibatan langsung dengan individu. Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2019).

2. Data Sekunder

Data sekunder berkaitan dengan data yang dikumpulkan oleh individu atau organisasi untuk tujuan selain dari penelitian yang sedang dilakukan, namun dapat digunakan oleh peneliti untuk upaya analitis mereka sendiri (Sugiyono, 2019).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dokumen, observasi dan wawancara. Menurut (Sugiyono, 2012), teknik dalam pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah, 2009). Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya.

Observasi dalam penelitian ini melihat data-data primer berupa peristiwa atau simulasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu dalam observasi peneliti ini melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

2. Wawancara

Zuriah (dalam Sugiyono, 2012), wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratann data yang diperoleh dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Zuriah dalam Sugiyono, 2012). Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip.

3.7 Teknik Analisis Data

Konsep analisis data mencakup penyederhanaan, seleksi, pengorganisasian serta pengfokusan data agar tersusun secara sistematis. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk memperoleh data secara kredibel dan mengantisipasi apabila pada saat proses wawancara jawaban yang didapat dirasa kurang memuaskan maka pertanyaan dapat diulang hingga mendapat data yang mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2019).

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Adapun teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut mencakup:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah ataupun hipotesis penelitian. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil dari jawaban informan yang diperoleh dari wawancara serta melihat langsung kondisi pertai melalui observasi.

2. Data Reduksi (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan pertransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan tentang hal-hal pokok yang dilakukan Partai PKS dalam pola kaderisasi dan pengembangan kader muda di Provinsi Lampung.

3. Penyajian Data (*data display*)

Peneliti menggunakan *data Display* untuk memudahkan pembaca memahami peristiwa maupun kejadian yang terjadi. Miles dan Huberman (2014) dalam melakukan *display data* selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan) dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang data yang ada.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dibutuhkan agar dapat mengevaluasi data-data yang diperoleh dari sebuah penelitian. Teknik keabsahan data memiliki tujuan sebagai alat untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan pada penelitian tersebut sudah akurat melalui berbagai sumber, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan di dalam mengabsahkan sebuah data penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti menyilangkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian digabungkan menjadi satu untuk mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2014).

Triangulasi sumber adalah *cross check* data dengan membandingkan fakta dari satu sumber dengan sumber yang lain Sugiyono (dalam Nurfajriani., dkk, 2024). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Patton dan Meleong 2014):

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum

4.1.1 Struktur Kepengurusan DPW PKS Provinsi Lampung

Dewan pimpinan wilayah adalah forum musyawarah unsur pimpinan struktur partai yang berkedudukan di ibu kota provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun. DPW dibentuk dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja partai yang bersifat kolektif dan kolegal. Kepengurusan DPW sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, bidang kaderisasi dan bidang perempuan dan ketahanan keluarga (AD ART PKS 2023).

DPW PKS Provinsi Lampung melaksanakan tugas tugasnya yang berdasarkan AD ART PKS 2023. Tugas tersebut dibagi menjadi tugas struktural, konsepsional, manajerial dan oprasional. Tugas struktural DPW, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan hasil rapat DPW
- b. Melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi DPW
- c. Mengusulkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah kepada DPP
- d. Mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada DPP atas rekomendasi

DPW dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah (DPD) terkait

- e. Mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada DPP atas rekomendasi DPW dengan memperhatikan usul DPD terkait
- f. Melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh DPD
- g. Merekomendasikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada DPP
- h. Mengusulkan bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur kepada DPP atas rekomendasi DPW
- i. Mengusulkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota kepada DPP sesuai dengan rekomendasi DPW dengan memperhatikan usul DPD terkait
- j. Menarik dan mengelola iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan DPP
- k. Menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan
- l. Mnyelenggarakan musyawarah wilayah atas perintah DPP
- m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPP melalui Musyawarah Wilayah.

Tugas konsepsional DPW sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan DPW beserta struktur partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan DPP
- b. Mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan DPW dengan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah

- c. Menetapkan produk konseptual untuk tugas internal dan struktur partai di bawahnya
- d. Merespons kebijakan pemerintah provinsi
- e. Memberikan asistensi dan pendampingan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam menyusun rancangan peraturan daerah provinsi.

Tugas manajerial DPW, sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pembentukan DPD
- b. Menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program DPD
- c. Membentuk dan mengoordinasikan lembaga pendukung partai, atas persetujuan DPP, dengan memperhatikan rekomendasi DPW
- d. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan DPP
- e. Melaksanakan koordinasi anggota partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif
- f. Melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan DPD sejauh struktur dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan DPP
- g. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan DPW setiap 6 (enam) bulan kepada DPP

Tugas operasional DPW sebagai berikut:

- a. Menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai
- b. Melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, politik, dan kepemimpinan.

Berdasarkan surat keputusan Nomor: 054.PW.2/SKEP/DPP-
PKS/2024 struktur dan pengurus DPW PKS Provinsi Lampung
masa bakti 2020-2025 memiliki 37 anggota pengurus dan 15
bidang bidang. Adapun untuk nama-nama dan jabatan DPW
PKS Provinsi Lampung masa bakti 2020-2025, sebagai berikut:

- 1) Ketua : H. Ahmad Mufti Salim, Lc., M.A.
- 2) Sekretaris : H. Agus Kurniawan, S.T.
- 3) Wakil Sekretaris 1 : H. Munawardi, S.P.
- 4) Wakil Sekretaris 2 : Rio Ferdinand
- 5) Bendahara : H. Yusnadi, S.T.
- 6) Wakil Bendahara 1 : H. Nursalim
- 7) Wakil Bendahara 2 : Oktaviantimala, S.Pd.

Bidang bidang yang ada di DPW PKS Provinsi Lampung masa
bakti 2020-2025, sebagai berikut:

a) Bidang Kaderisasi

Ketua : Drs. H. Joko Mulyono, M.AP.
Sekretaris : Trisakti Wijayana, S.PD., M.Pd.

b) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Ketua : Hj. Heni Nurmaii, S.S., S.Pd., M.Pd.I
Sekretaris : Lia Sartia, S.Si.

c) Bidang Kepemudaan

Ketua : Agus Solihin, S.Pi.
Sekretaris : Ahmad Khoirudin Syam, S.Kom.

d) Bidang Kepanduan

Ketua : Cucu Mulyono
Sekretaris : Mastini, S.Pd

- e) Bidang Pemenagan Pemilu dan Pilkada
Ketua : Aep Saripudin, S.P.
Sekretaris : Ringga Oktobara, S.Pt.

- f) Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua : Hendro Sasongko
Sekretaris : Rofianto, S.I. Kom.

- g) Bidang Seni Budaya
Ketua : Yuda Roseptalia, STP
Sekretaris : Tri Agustiana, S.E.

- h) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ketua : Hi. Muchlas Ermanto Bastari, SE
Sekretaris : Achmad Rochfi'I, S.Si.

- i) Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan
Lingkungn Hidup
Ketua : Sabiqul Iman, S.A.B., M.Si.
Sekretaris : Evi Virdiana, S. Si.

- j) Bidang Kesejahteran Sosial
Ketua : Linda Wuni, S.T.P.
Sekretaris : Lydia Agustina, S.Pd.

- k) Bidang Keumatan dan Dakwah
Ketua : Syaiful Mukhrom
Sekretaris : Budi Harsono, S.Pd.

- l) Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader
Ketua : Andi Wahyudi, RO.

- Sekretaris : Indra Dharmawan, S.T.P.
- m) Bidang Ketenagakerjaan
- Ketua : Muhammad Taufik, S.T.
- Sekretaris : Dra, Maisaratun Zubaidah
- n) Bidang Tani dan Nelayan
- Ketua : Eko Zainuti, S.P.
- Sekretaris : Damayanti, S.Pd., M.Pd.
- o) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa
- Ketua : H. Aep Susanto, S.Si., M.Si.
- Sekretaris : Larto Darmawan

4.1.2 Visi Misi PKS

a. Visi PKS

Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

b. Misi PKS

Misi partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,

4.1.3 Falsafah Dasar Perjuangan PKS

Falsafah dasar perjuangan PKS adalah pemikiran mendasar tentang nilai-nilai yang diperjuangkan PKS, hasil dari proses objektifikasi nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam*, dalam memberikan landasan, arah dan tujuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perumusan falsafah dasar perjuangan ini memiliki tujuan sebagai rujukan utama dalam proses konsolidasi ideologisasi partai, pengejawantahan arah perjuangan partai sebagaimana tercantum dalam ADART PKS dan sebagai acuan dasar para anggota partai dalam berjuang di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Falsafah dasar perjuangan PKS dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

1. Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, lingkungan, dan alam semesta.
2. Keadilan merupakan kebajikan utama umat manusia yang keberadaannya mutlak diperlukan sepanjang sejarah kemanusiaan.
3. Kebangsaan sebagai wawasan yang dibangun dengan kesadaran bahwa Islam mengajarkan umat manusia untuk mencintai tanah airnya dan menjaga kesepakatan luhur yang diwarisi dari generasi ke generasi.
4. Kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah yang perlu disyukuri dan dijaga untuk mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945. Falsafah dasar perjuangan PKS dalam kenegaraan meliputi:
 - a. Keagamaan
 - b. Politik, hukum dan hak asasi manusia
 - c. Pertahanan dan keamanan
 - d. Ekonomi
 - e. Pertanian dan kelautan
 - f. Ketenagakerjaan

- g. Sumber daya alam, agrarian, kehutanan, dan lingkungan hidup
 - h. Pendidikan, sosial dan budaya
 - i. Kesehatan
 - j. Hubungan Internasional
 - k. Indivisu, keluarga, hubungan kemitraan laki laki dan perempuan
5. Kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan cita cita nasional yang harus diperjuangkan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.1.4 Arti Lambang Partai PKS



Gambar 4. 1 Lambang PKS

Sumber: *PKS ID 2021*

Lambang PKS memiliki tafsir sebagai berikut:

- a. Warna putih bersegi empat melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia;
- b. Bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila;

- c. Dua (2) bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. Untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan semangat Proklamasi, adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
- e. Warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan semangat muda dalam kehidupan yang selalu optimis;
- f. Warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan;
- g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Filosofi dari lambang PKS yaitu dengan berlandaskan Islam *rahmatan lil-'alamin* dan semangat Proklamasi membina kepeloporan jiwa muda dan patriotik serta jiwa kesiapsiagaan, pelayanan, dalam rangka mewujudkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.1.5 Sistem Kaderisasi

PKS menyelenggarakan kaderisasi anggota partai atau kader partai secara berjenjang dan berkelanjutan. Kaderisasi kader partai dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota (UPA). Kelompok anggota partai PKS terdiri atas:

a. Kelompok Anggota Pendukung

Anggota pendukung dibagi menjadi dua kelompok yakni anggota pemula dan anggota siaga yang keduanya diartikan sebagai anggota resmi sebab telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) dan anggota yang terlibat aktif dalam kegiatan partai,

b. Kelompok Anggota Penggerak

Anggota penggerak dibagi menjadi dua kelompok yakni:

- 1) Anggota muda yang diartikan sebagai anggota yang mengikuti pembinaan partai
- 2) Anggota pratama adalah anggota yang siap berkontribusi kepada bangsa dan negara bersama partai.

c. Kelompok Anggota Pelopor

Anggota pelopor dibagi menjadi tiga kelompok terdiri atas:

- 1) Anggota madya yang diartikan sebagai anggota yang terkait dengan segala peraturan partai
- 2) Anggota dewasa adalah anggota yang dinamisator dalam kerja kerja partai sedangkan
- 3) Anggota utama adalah anggota yang menjadi teladan partai.

VI. PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, simpulan dari penelitian “Pola Kaderisasi PKS dalam Pengembangan Kader Muda di Provinsi Lampung” kaderisasi berjalan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Indikator yang menopang kaderisasi berjalan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan yaitu, penerapan tata norma, aturan, dan tata institusi, model rekrutmen yang terbuka, sistem evaluasi pembinaan kader yang berkesinambungan, *affirmative action* dalam pembinaan kader perempuan, dan model pembinaan kader perempuan.

Namun, dalam pengembangan kader muda, PKS Provinsi Lampung menghadapi kendala dalam jaringan kerja kader. Meskipun PKS telah menyediakan wadah bagi kader muda melalui Gema Keadilan (GEMA) dan Garuda Keadilan (GK), masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Hambatan utama pada Gema terletak pada transisi kader yang bergantung pada kepengurusan pusat, sehingga ketika terjadi kevakuman di tingkat nasional, kegiatan di daerah ikut terhenti. Sementara itu, jaringan kader GK masih terbatas dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal yang membuat citra GK cenderung eksklusif sebagai wadah anak kader PKS menyebabkan organisasi ini kurang terbuka bagi kalangan muda di luar lingkungan partai.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat Peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem kaderisasi yang lebih mandiri, sehingga keberlangsungan program tidak terpengaruh oleh dinamika di tingkat pusat.
2. Meningkatkan interaksi antar kader melalui forum dan kegiatan bersama serta kegiatan sosial dan politik yang melibatkan kader dari berbagai daerah untuk memperkuat solidaritas dan jejaring kerja kader.
3. Memperluas jejaring dengan komunitas eksternal, seperti organisasi kepemudaan dan akademisi, guna meningkatkan daya tarik dan wawasan kader.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Rahman, H.I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burke, E. (2005). *Burke, Select Works (Vol. 1)*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Budihardjo, I. M. (2014). *Panduan Praktis Menyusun SOP*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Didjaja, Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Firmanzah. (2008). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, S., Bhakti, I. N., Nurhasim, M., Nuryanti, S., Yanuarti, S., Tryatmoko, M.W. & Budiatri, A. P. (2016). *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: KPK–LIPI.
- Kurniasari, I. (2015). *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran Untuk Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Kata Pena
- Laily, N. (2020). *Teori Jaringan Sosial*. Semarang: Edulitera (Anggota IKAPI).
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. *Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press*.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- P. Loina Lalolo. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soeprapto. (2007). *Interaksi Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarifuddin. (2002). *Manajemen Mutu*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.

Skripsi:

Hartoni, M. R. (2021). *Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung (Studi Pada Partai Periondo dan Partai Berkarya)*. (Skripsi). Universtas Lampung.

Toni, A. (2013). *Model Kaderisasi Partai Politik pada DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung*. (Skripsi). Universitas Lampung.

Yahya, U. (2023). *Pola Kaderisasi Anggota Partai Politik (Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sumbawa)*. (Disertasi). Universitas Muhammadiyah Mataram.

Jurnal & Sumber Lain:

Harahap, I. H. (2017). Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional. *Bakrie*.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.

Nofiard, F. (2013). Kaderisasi kepemimpinan pambakal (kepala desa) di desa hamalau kabupaten hulu sungai selatan. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).

Muhaling, A. R., Palandeng, I. D., & Sumarauw, J. S. (2021). Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pada PT. Taspem (PESERO) Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(4), 572-581.

- Nurtanto, A., & Munandar, A. (2021). Pola Kaderisasi Organisasi Ekstra Kampus: Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UIN Syarif Hidayatullah. *Unnes Political Science Journal*, 5(2), 42-47.
- Perdagangan, K., Bontang, U. K., Ridwan, M., & Hartutiningsih, M. A. H. (2014). Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2).
- Rahmawati, R. F. (2016). Kaderisasi Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan Islam Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1).
- Rafni, A. (2015). Pembinaan Perempuan Kader Partai oleh Partai Politik dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia. *In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi, dan Humaniora (Vol. 5, No. 1, pp. 281-286)*.
- Syahputra, M. R., & Darmansah, T. (2020). Fungsi Kaderisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan. *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)*, 2(3), 20-28.
- Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(2), 169-189.